

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan hal yang penting dan patut untuk dibincangkan di era masa kini karena sangat penting serta bermanfaat bagi putra-putri bangsa Indonesia. Degradasi moral dan sikap yang semakin hari kian menggerus nilai luhur bangsa sebagai dampak dari pengaruh globalisasi yang menyerbu dan terus datang tiada hentinya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat berbanding lurus dengan kemajuan zaman yang menuntut kita untuk fokus terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan negara agraris yang memiliki berjuta kekayaan hayati yang tidak ternilai harganya. Tetapi Indonesia sendiri memiliki tingkat kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga belum mampu untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan itu secara maksimal. Pemerintah sudah dengan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mulai dari program wajib belajar 9 tahun hingga pemerintah mewajibkan belajar 12 tahun, yakni tingkat SMA/SMK/MA dan Sederajat yang tidak lain bertujuan agar masyarakat Indonesia khususnya putra putri bangsa dapat memperoleh pendidikan yang maksimal dan berkualitas.

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Berdasarkan definisi di atas terdapat tiga pokok pikiran utama yang tergantung di dalamnya, yaitu (1) usaha sadar dan terencana, yang menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual); (2) mewujudkan suasana belajar dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman bagi siswa dan mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, mulai dari kegiatan pra-pembelajaran, proses pembelajaran di kelas, hingga kegiatan evaluasi dan penilaian; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term *al-tarbiyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'dib*. Dari ketiga istilah tersebut, term yang populer digunakan dalam praktik pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah*. Sedangkan term *al-ta'dib* dan *al-ta'lim* jarang digunakan.² Sebuah lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai seperti yang disebutkan dalam QS. As-Sajdah ayat 5.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1, h. 1.

² Abdul Hakim, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 25.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا

تَعُدُّونَ

Pendidikan dan pengajaran dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi otak peserta didik dengan segala macam ilmu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *tarbiyah* adalah mempersiapkan manusiawan agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekerti (akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan.³ Pendidikan dalam Islam memiliki dasar yang bersumber dari Alquran dan Hadits (Sunnah) yang tidak hanya sebagai fondasi penopang seluruh bangunan pendidikan Islam, namun juga sebagai sumber ilham, inspirasi, pedoman, tuntunan serta sumber arahan bagi seluruh bangunan sistem, konsep atau teori dan implementasinya dalam kehidupan umat muslim.

Dengan uraian di atas, semakin jelas bahwasanya pendidikan itu merupakan sebuah hal yang penting bagi seorang warga negara dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghasilkan dan membentuk pendidikan yang berkualitas, tidak kecuali bagi pemerintah sebagai lembaga eksekutif negara yang memiliki wewenang dalam mengonsep dan mewujudkan pendidikan yang berguna dan bermanfaat bagi setiap warga negara serta dapat dijangkau oleh masyarakat pada setiap jenjang juga tingkatannya.

³ Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok-Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 20-21.

Namun, terdapat sebuah problematika yang mana pendidikan Indonesia tidak bisa disamaratakan dalam pelaksanaannya pada setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah boleh menetapkan standarisasi dan membuat pedoman pelaksanaan pendidikan bagi sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya, namun pemerintah tidak bisa menggeneralisasikan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Sebab setiap wilayah yang berada di bawah naungan NKRI memiliki tingkat kualitas pendidikan yang berbeda-beda. Kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terluar dan terdalam dengan laju pembangunan daerah layaknya bayi yang baru belajar merangkak, tidak bisa dibandingkan dengan kualitas pendidikan pada daerah perkotaan yang laju pembangunan daerahnya jauh lebih baik dan cepat. Tidak mengherankan banyak masyarakat daerah masih kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Jangankan untuk memperoleh pendidikan, untuk mencari penghidupan sehari-hari saja mereka masih tertatih-tatih, namun perjuangan dan semangat mereka tidak bisa kita pandang sebelah mata.

Berdasarkan fenomena tersebut pemerintah melakukan perubahan arah kebijakan, yakni diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dengan disempurnakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, dimana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahannya sendiri guna

mensejahterakan masyarakat di daerahnya⁴. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah ini memberi dampak yang signifikan pada sektor pendidikan. Terlebih dengan dilahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan dengan *bottom up* yang semula *top down* dengan sistem sentralisasinya dengan harapan terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang diuraikan dalam pasal 8, 9, dan 11 ayat 2 pada undang-undang tersebut. Otonomi pendidikan diberikan kepada lembaga pendidikan di Indonesia merupakan wujud kepedulian pemerintah akan upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum dan sebagai sarana peningkatan efisiensi pemerataan pendidikan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas mencakup filosofi, tujuan, format, isi dan manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasi dari semua hal itu adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan berorientasi jauh ke masa depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang *tren* perkembangan masyarakat untuk menjadikan sebuah kelompok masyarakat yang lebih baik serta merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

⁴ Usman Husaini, *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 573.

Selain itu, otonomi pendidikan lebih memperhatikan keberadaan anak didik yang tinggal dan hidup di tengah-tengah keragaman karakter, etnis, budaya, dan agama. Oleh karena itu, otonomi pendidikan hendaknya melibatkan semua unsur yang ada di daerah dalam rangka memajukan pendidikan dalam upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia.⁵

Seiring dengan diterapkannya konsep desentralisasi pendidikan memberikan dampak pada sektor bagian dari pendidikan sekolah, salah satunya adalah masalah kurikulum. Sebagaimana telah diketahui bahwa kondisi masyarakat Indonesia sangat heterogen dengan berbagai macam keragamannya, seperti dalam hal budaya, adat istiadat, suku, sumber daya alam, bahkan sumber daya manusianya. Masing-masing daerah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan otonomi pendidikan.

Kurikulum dalam konteks otonomi pendidikan adalah suatu lembaga pendidikan tidak sekedar daftar mata pelajaran yang dituntut dalam suatu jenis jenjang pendidikan, tetapi merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas, di halaman maupun di luar sekolah.⁶ Kurikulum dianggap sebagai hal yang penting sebagai pendukung utama majunya pendidikan. Kurikulum yang terarah dan sesuai merupakan pedoman untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang diharapkan. Kebijakan otonomi pendidikan ini diberlakukan saat kurikulum KTSP menjadi kurikulum

⁵ Hartono, "Otonomi Pendidikan", Jurnal Potensia, Vol. 14 Edisi 1 Januari-Juni 2015, 2015, h. 55.

⁶ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5.

pendidikan di Indonesia kala itu dan sekarang pemerintah merubahnya dengan kurikulum K13 yang lebih sentralistik.

Walaupun demikian, masih banyak sekolah/madrasah yang masih mengadopsi kurikulum KTSP karena beberapa alasan, di antaranya ketidakmampuan guru untuk menerapkan K13 di sekolah/madrasah. Hal tersebut yang turut menjadi masalah di daerah sehingga menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Mengingat bahwa kurikulum menjadi pedoman penting untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum hendaknya bersifat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga perlu adanya pengembangan sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan pendidikan secara global. Kurikulum juga tidak dipahami sebatas apa yang telah tercantum dalam bahan atau materi pelajaran, tetapi perlu adanya pengembangan pemahaman secara lebih luas.

Sebagai salah satu substansi manajemen madrasah yang vital, kurikulum perlu dikelola dengan baik agar dalam pelaksanaannya kurikulum dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen atau pengelolaan secara integral dan kontinu. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien.⁷ Kegiatan-kegiatan fungsional manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan penilaian (*evaluating*).

Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di madrasah, prinsip dasar manajemen ini adalah berusaha agar proses pembelajaran

⁷ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), cet. XV, h. 15.

dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Penggunaan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) diharapkan mampu menjabarkan tentang pengelolaan kurikulum secara jelas, detail dan menyeluruh. Sebab fungsi yang dikemukakan olehnya menjelaskan keseluruhan proses dalam pengelolaan, mulai dari tahap awal merencanakan, mengorganisasikan, kemudian melaksanakan, dan terakhir mengawasi dari proses tersebut.

Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Diniyah Islamiyah Muhammadiyah 1 Kindaung merupakan sebuah madrasah yang didirikan dengan tujuan sebagai lembaga pendidikan yang berbasis lembaga dakwah, sosial, dan kaderisasi, bukan sebagai lembaga penghasil profit (keuntungan) yang memperhitungkan dana masuk dan keluar yang dilakukan oleh madrasah.

Madrasah ini pada pendiriannya di tahun 1929 M bernama Madrasah Diniyah Islamiyah yang merupakan sebuah madrasah diniyah dengan hanya mengajarkan pendidikan agama dan Alquran sebagai bentuk keprihatinan pendiri terhadap keadaan masyarakat pada saat itu yang berada dalam kebodohan dan keterbelakangan pendidikan. Pada tahun 1965 M, Madrasah Diniyah Islamiyah resmi menjadi Madrasah Diniyah Islamiyah Muhammadiyah Sungai Kindaung Banjarmasin karena permintaan dari organisasi Muhammadiyah untuk menjadi salah satu amal usahanya. Selain itu, adanya persamaan pandangan dan

pemahaman serta untuk pengembangan gerakan yang lebih luas pendiri madrasah bergabung dan terlibat aktif dalam organisasi Muhammadiyah tersebut.

Kata “diniyah” yang digunakan dalam nama madrasah ini dipahami sebagai bagian dari nama madrasah dengan tidak mengarah kepada sekolah “diniyah” yang dalam lingkup Kementerian Agama merupakan sekolah nonformal dengan proses belajar mengajarnya diselenggarakan saat sore hari yang mengkhususkan pada kajian agama Islam dan bahasa Arab saja, tetapi mengacu kepada pendidikan dasar formal Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah naungan Kementerian Agama pada proses belajarnya.

Karakter lulusan yang diharapkan oleh madrasah adalah peserta didik yang berkepribadian muslim yang lurus aqidahnya (*Salimul Aqidah*), benar ibadahnya (*Shahihul Ibadah*) dan mulia akhlaknya (*Akhlakul Karimah*) sesuai dengan tuntunan Allah Swt dan Rasul-Nya yang terdapat dalam tujuan madrasah. Untuk mencapai hal tersebut, madrasah melaksanakan program pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama dengan lebih menekankan pada pendidikan agama Islamnya dibanding pendidikan umum. Madrasah juga memodifikasi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan madrasah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan sekolah. Hal tersebut diketahui melalui proses perencanaan kurikulumnya, seperti di antaranya penentuan landasan kurikulum, perumusan tujuan kurikulum dan pembuatan isi kurikulum. Selain itu, proses pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pada madrasah ini turut menggambarkan bahwa madrasah menyesuaikan pelaksanaan kurikulum yang

ditetapkan pemerintah dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan madrasah. Oleh karena itu, madrasah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah secara penuh dan mandiri, salah satunya pada manajemen kurikulum madrasah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengelolaan kurikulum yang berbasis madrasah. Laporan hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN KURIKULUM BERBASIS SEKOLAH DI MIS DINIYAH ISLAMIYAH MUHAMMADIYAH 1 KINDAUNG BANJARMASIN”**.

B. Definisi Operasional

1. Manajemen

Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mengatur sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam bentuk program sekolah maupun satuan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah/madrasah.

3. Manajemen Kurikulum Berbasis Sekolah

Maksud dari kurikulum berbasis sekolah disini ialah kurikulum yang dirancang sepenuhnya oleh sekolah/madrasah secara mandiri disamping

menyesuaikan dengan pedoman kurikulum yang ditetapkan pemerintah, seperti mengadakan mata pelajaran yang beda dengan sekolah/madrasah lain, contohnya mata pelajaran Tahfizh, Muatan Lokal Daerah.

C. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitiannya yaitu: bagaimana manajemen kurikulum berbasis sekolah di MIS Diniyah Muhammadiyah 1 Kindaung Banjarmasin, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk membatasi fokus tersebut berikut dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perencanaan manajemen kurikulum berbasis sekolah di MIS Diniyah Muhammadiyah 1 Kindaung Banjarmasin?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen kurikulum berbasis sekolah di MIS Diniyah Muhammadiyah 1 Kindaung Banjarmasin?
3. Bagaimana evaluasi manajemen kurikulum berbasis sekolah di MIS Diniyah Muhammadiyah 1 Kindaung Banjarmasin?

D. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah penelitian, selanjutnya ditentukan tujuan penelitian ini yaitu: mengetahui bagaimana manajemen kurikulum berbasis sekolah di MIS Diniyah Muhammadiyah 1 Kindaung Banjarmasin, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

E. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul “Manajemen Kurikulum Berbasis Sekolah di MIS Diniyah Islamiyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin”, dengan didasarkan pada alasan berikut:

1. Dalam sebuah sekolah/madrasah, manajemen merupakan proses pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga tanpa adanya proses manajemen yang baik, sudah dapat dipastikan tujuan pendidikan dan pembelajaran yang diharapkan akan sulit dicapai. Selain itu, fungsi manajemen turut serta mempengaruhi keseluruhan proses dalam sebuah lembaga pendidikan karena alurnya komprehensif dan kontinu yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Manajemen kurikulum adalah satu dari beberapa substansi manajemen pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peran krusial dalam proses belajar mengajar di sekolah. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan, tergantung bagaimana proses pengelolaan kurikulum yang baik dan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila baik dalam pengelolaannya, maka lembaga pendidikan tersebut memiliki keberhasilan pada proses belajar mengajarnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban sebuah sekolah/madrasah memerhatikan pengelolaan kurikulum dengan cara mengetahui bagaimana manajemen kurikulum yang baik dengan tepat dan benar.

3. MIS Diniyah Islamiyah Muhammadiyah 1 Kindaung Banjarmasin adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis agama Islam yang menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam proses pengelolaannya, terlebih dalam bidang kurikulum yang memodifikasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat, salah satu contohnya pengadaan program *tahfizh* Alquran, dan contoh lainnya. Dengan ini, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut manajemen kurikulum berbasis sekolah di madrasah ini.

F. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat minimal menemukan tentang kesimpulan/konsep manajemen kurikulum berbasis sekolah sehingga dapat memperkaya disiplin ilmu manajemen pendidikan Islam.
 - b. Secara konseptual dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan manajemen kurikulum berbasis sekolah.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan wawasan kepada sekolah khususnya kepala sekolah beserta jajarannya tentang manajemen kurikulum berbasis sekolah pada MIS Diniyah Islamiyah Muhammadiyah 1 Kindaung Banjarmasin.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam dengan fokus penelitian yang berbeda untuk

memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran data kepustakaan atau penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang sama tentang manajemen kurikulum berbasis sekolah, sebagai berikut:

1. Yuhanas Prastya Sumarlan (2016) *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar*, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Penelitian yang dilakukannya fokus kepada penerapan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Pengaron Kecamatan.
2. Ismaya Sari (2014) *Peran Kepala Madrasah Dalam Manajemen Kurikulum Pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin*, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun fokus penelitiannya pada peran kepala madrasah dalam manajemen kurikulum pada MTs Muhammadiyah 3 AlFurqan Banjarmasin.
3. Noor Lela (2009) *Administrasi Kurikulum Pada Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu "Qardhan Hasanah" Banjarbaru*, Skripsi, Jurusan Kependidikan Administrasi Manajemen Pendidikan Islam. Fokus penelitiannya pada administrasi kurikulum pada SMAIT Qardhan Hasanah Banjarbaru.

Berdasarkan ketiga judul di atas, penulis tidak menemukan judul yang lebih spesifik membahas tentang manajemen kurikulum berbasis sekolah. Oleh karena itu, penulis mengambil bahan studi pendahuluan dengan disajikan beberapa judul di atas sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi penelitian terdahulu yang dimuat di dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi tentang konsep manajemen beserta fungsifungsinya dan penjelasan mengenai kurikulum menurut tinjauan literatur serta referensi yang diperoleh penulis.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Pembahasan, berisi gambaran lokasi penelitian penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.